

LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI II DPR RI
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
KAMIS, 11 FEBRUARI 2010

Tahun Sidang : 2009-2010
Masa Persidangan : II
Rapat Ke : --
Sifat : Terbuka
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat (RDP)
Dengan : Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Hari/Tanggal : Kamis, 11 Februari 2010
Pukul : 10.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara/KK.III)
Ketua Rapat : Drs. H. Burhanuddin Napitupulu/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat : Juliasih, SH/Kabagset. Komisi II DPR RI
Acara : - **Membahas Penyelesaian terhadap Relokasi STTIA;**
- **Masalah aktual lainnya.**
Kehadiran : 35 dari 50 Anggota Komisi II DPR RI
15 orang izin

HADIR :

- ◆ Drs. H. Burhanuddin Napitupulu
- ◆ DR. Drs. H. Taufiq Effendi, MBA
- ◆ Ganjar Pranowo
- ◆ H. Abdul Wahab Dalimunte, SH
- ◆ Ignatius Mulyono
- ◆ Ir. Nanang Samodra KA, M.Sc
- ◆ Dr. H. Subyakto, SH.,MH.,MA
- ◆ Drs. H. Djufri
- ◆ Drs. H. Amrun Daulay, MM
- ◆ Drs. H. Abdul Gafar Patappe
- ◆ Muslim, SH
- ◆ Rusminiati, SH
- ◆ Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM
- ◆ Nurul Arifin S.IP.,M.Si
- ◆ Drs. Taufiq Hidayat, M.Si
- ◆ Mustokoweni Murdi, SH
- ◆ Hj. Nurokhmah Ahmad Hidayat Mus
- ◆ Drs. H. Murad U. Nasir, M.Si
- ◆ Budiman Sudjatmiko, M.Sc.,M.Phill
- ◆ Dr. Yasona H. Laoly, SH.,MH
- ◆ Alexander Litaay
- ◆ Dra. Eddy Mihati, M.Si
- ◆ Irvansyah, S.IP
- ◆ H.M Gamari Sutrisno
- ◆ H. Tossy Aryanto, SE.,MM
- ◆ Drs. H. Rusli Ridwan, M.Si
- ◆ Wa Ode Nurhayati, S.Sos
- ◆ H. M. Izzul Islam
- ◆ Dr. AW. Thalib, M.Si
- ◆ Dra. Hj. Ida Fauziyah
- ◆ Hj. Mastitah S.Ag.,M.Pd
- ◆ Abdul Malik Haramain, M.Si
- ◆ Drs. H. Harun Al-Rasyid, M.Si
- ◆ Mestariany Habie, SH
- ◆ Djamal Aziz, B.Sc, SH.,MH

IZIN :

- ◆ Ir. Teguh Juwarno, M.Si
- ◆ Kasma Bouty, SE.,MM
- ◆ Dra. Gray Koes Moertiyah, M.Pd
- ◆ Khatibul Umam Wiranu, M.Hum
- ◆ H. Tubagus Imam Ariyadi, S.Ag.,MM.,M.Si
- ◆ Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc IP.,M.Si
- ◆ Dr. M. Idrus Marham
- ◆ H. Rahardi Zakaria, S.IP.,MH
- ◆ Arif Wibowo
- ◆ Drs. Mahfudz Siddiq, M.Si
- ◆ Aus Hidayat Nur
- ◆ Agus Purnomo, S.IP
- ◆ H. Sukiman, S.Pd.,MM
- ◆ Drs. H. Nu'man Abdul Hakim
- ◆ Miryam S. Haryani, SE.,M.Si

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dibuka pukul 10.15 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, Yth. Drs. H. Burhanuddin Napitupulu.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Masalah relokasi Sekolah Tinggi Theologi Injil Arastamar (STTIA) di Kampung Pulo, Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur.
2. Pengelolaan perizinan dan pengelolaan tanah, termasuk mekanisme pengelolaan peruntukan tanah yang beralaskan Hak Pengelolaan dan Hak Guna Usaha yang ada di DKI Jakarta.
3. Perkembangan penanganan/penyelesaian Tenaga Honorer dan Penerapan Renumerasi di DKI Jakarta.
4. Pelaksanaan/implementasi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

III. KESIMPULAN/PENUTUP

Setelah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta) dan Perwakilan dari Yayasan Bina Setia Indonesia (STTIA) menyampaikan penjelasan atas pertanyaan dari anggota Komisi II DPR RI dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Komisi II DPR RI memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah melakukan berbagai upaya penyelesaian, dalam penyelesaian konflik yang terjadi antara pihak Yayasan Bina Setia Indonesia dengan masyarakat.
2. Terhadap permasalahan STTIA, Komisi II DPR RI mendesak kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Yayasan Bina Setia Indonesia, Rektoriat STTIA, Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama, Dirjen Perguruan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional untuk segera menyelesaikan proses penyelesaian masalah STTIA dan selanjutnya melaporkan hasilnya dalam waktu **1 (satu) bulan**.
3. Komisi II DPR RI meminta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera menyelesaikan masalah-masalah pertanahan yang terkait dengan HPL, HGU, dan HGB serta meminta kepada Sekretariat Tim Pertimbangan Urusan Tanah (STPUT) agar tetap konsisten dengan mekanisme dan pengelolaan tanah di DKI Jakarta, termasuk mencegah sedini mungkin terjadinya pengalihan tanah-tanah jalur terbuka hijau, pedestrian, fasos, fasum, dan lapangan-lapangan olah raga untuk publik.
4. Terkait dengan pengangkatan Tenaga Honorer yaitu tenaga PTT dan Guru Bantu menjadi PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, baik sebagai Tenaga Guru dan Non Guru, Komisi II DPR RI meminta agar tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah tentang Pengangkatan Tenaga Honorer yang sekarang dalam proses penyelesaian Peraturan Pemerintah sebagai payung hukumnya, sehingga bagi pegawai honorer yang telah memenuhi syarat harus segera diangkat, sedangkan Tenaga Honorer yang tidak memenuhi syarat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus tetap diakomodasi dengan pendekatan kesejahteraan.

Rapat diakhiri dan ditutup pukul 17.45 WIB.

**JAKARTA, 11 FEBRUARI 2010
PIMPINAN KOMISI II DPR RI
KETUA,**

TTD

DRS. BURHANUDDIN NAPITUPULU
A-177